

Indonesia Menjadi Pusat Keuangan Islam

<https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/09/07/penwiu440-indonesia-menjadi-pusat-keuangan-islam>

Jumat 07 September 2018 08:37 WIB

Red: Elba Damhuri

Indonesia menjadi penerbit sukuk infrastruktur terbesar di dunia.

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: **Muhammad Gunawan Yasni**, *Pengajar dan Praktisi Keuangan Syariah*



Acara The Islamic Finance Week September 2018 Mansion Hall London, Inggris, menghadirkan Lord Mayor Charles Bowman dan John Glen (Economic Secretary to the Treasury, Her Majesty Treasury). Langkah ini mengindikasikan Inggris tetap

berupaya menjadi pusat keuangan Islam dunia, ketahanan keuangan dan tetap menjadi pusat pendidikan keuangan Islam yang antisipatif dan koordinatif dengan perkembangan industri keuangan Islam di belahan dunia mana pun.

Bank of England dan beberapa pihak yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat (AS) lainnya, mengajak berdiskusi lebih lanjut tentang *sharia governance* di Indonesia. Mereka lakukan hal itu setelah mendengarkan pemaparan tentang Indonesia yang menjadi besar dalam sukuk negara berkat peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kementerian Keuangan.

Juga penjelasan soal bagaimana bank syariah dan industri keuangan syariah lainnya lebih dijaga kesyariahannya dengan *governance* (tata kelola) yang merupakan kombinasi berbagai otoritas, yaitu otoritas fatwa di DSN-MUI, moneter di BI, dan otoritas industri keuangan di OJK. Hal menarik buat mereka adalah 80 orang di DSN-MUI, yang diwakili 40 orang di Badan Pelaksana Hariannya, mampu menjaga dan mewarnai perkembangan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Bahkan, lembaga ini mendorong Pemerintah Indonesia menjadi penerbit sukuk negara terbesar di dunia yang berbasis utama ke infrastruktur, yang disinyalir sebagai satu-satunya yang mampu dalam level pemerintahan. Inggris merasakan, hal ini belum mungkin dapat mereka saingi dalam waktu dekat.

Hal menarik dari sisi pasar modal dalam diskusi di *Islamic Finance Week* ini adalah perkembangan sistem bursa efek yang mulai mengarah ke *sharia capital token system* sebagai bagian *sharia value based intermediation* yang intinya adalah *sharia digital finance*.

Sharia capital token system sebagai *open and managed blockchain system*, diharapkan menjadi platform teknologi finansial yang akan meminimalisasi biaya penerbitan saham syariah atau sukuk yang kini berkisar 2-4 persen dari *value* pada proses IPO saham atau sukuk.

Disinyalir, biaya penerbitan *sharia capital token* bisa ditekan pada kisaran angka 0,01-1 persen bergantung pada nilai penerbitan. Semakin besar nilai penerbitan maka akan semakin mungkin mendekati 0,01 persen.

Beberapa cikal bakal *sharia capital token system* sudah dimulai di Indonesia. Misalnya, Klik MAMI yang dimotori oleh Manulife Asset Management Indonesia dengan pembelian *sharia mutual funds* melalui sistem daring dengan kelipatan Rp 10 ribu, yang nilainya semakin kecil dengan depreasi rupiah beberapa waktu terakhir.

Sepantasnya juga, *sharia online trading stocks* (SOTS) yang dimotori DSN-MUI dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan inisiasi beberapa perusahaan anggota bursa dapat menjadi cikal bakal *sharia capital token system* di Indonesia. BEI selayaknya mulai melirik *capital token system* tersebut yang kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang dapat menggairahkan bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah yang melantai di bursa.

Pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan *sharia capital token system* untuk mendistribusikan dan mentransaksikan sukuk negara secara retail dan mikro di masyarakat ataupun secara *blockchain* dan global.

Ini sangat baik guna menginklusi banyak pihak untuk investasi infrastruktur daripada meminjam langsung dalam bentuk valuta asing dari negara lain, yang membuat Indonesia mudah ditekan secara politik ataupun ekonomi oleh negara pemberi pinjaman. Masif tidaknya suatu *blockchain* tidak hanya bergantung pada besarnya nilai transaksi, tetapi juga jumlah yang bertransaksi.

Potensi Indonesia dengan sekitar 40 juta warganya yang sudah menjadi bagian pasif ataupun aktif dari industri keuangan syariah, memberi skala ekonomi memadai untuk memulai *sharia capital token system* sebagai bagian *sharia digital finance*.

Di Inggris, masing-masing pelaku industri keuangan syariah berusaha saling bersinergi dan saling memberi yang terbaik untuk pemegang akun-akun keuangan syariah, yang jumlahnya seluruh Eropa hanya berkisar 25 juta kelas menengah.

Selama ini, mereka di Inggris baru mendapatkan 'tidak banyak' jumlah pemegang akun keuangan syariah dengan nilai fantastis, tapi dalam perjalanannya dapat sewaktu-waktu begitu saja menjadi tidak loyal terhadap produk dan lembaga keuangan syariah.

Sebagian mereka adalah pemegang akun keuangan syariah dari Timur Tengah. Seiring keadaan ekonomi dan politik yang semakin

kurang stabil di Timur Tengah, Inggris mulai menjadikan 25 juta orang kelas menengah Eropa sebagai stakeholders yang lebih menjanjikan stabilitas Inggris sebagai pusat keuangan Islam.

Dengan cikal bakal *sharia capital token* yang juga dikembangkan secara sporadis di Indonesia, perlu rasanya ada *corporate university* yang mengembangkan *sharia digital finance* sebagai kekhususan.

Bank BRI dengan cikal bakal *corporate university* yang mengkhususkan diri pada *sharia digital finance* adalah sebuah keniscayaan, mengingat BRI satu-satunya bank di Indonesia yang memiliki satelit.

Selain itu, BRI merupakan pemilik Bank BRI Syariah, yang bersama BRI dan anak perusahaannya yang lain sudah melantai di bursa. Indonesia sering dilihat dunia sebagai negara yang berpotensi menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Terlebih dengan model koordinasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang melibatkan presiden dan wakil presiden beserta menteri-menterinya dan pimpinan otoritas-otoritas keuangan, ditambah pimpinan lembaga fatwa di bidang ekonomi dan keuangan.

Ini diharapkan memberikan kontribusi loncatan kuantum terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Dengan KNKS, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah, bukan

hanya hub syariah seperti negara-negara

Pusat Keuangan Islam

■ HIMPUNAN EKSPERTIS
SARAF DAN KEUANGAN
ISLAM

Arahan The Islamic Finance Week September 2018 di London, Inggris, mengkonfirmasi Lantai Mayor Charles Rowson dan John Chen (Kementerian Keuangan) sebagai pembicara utama dalam acara ini.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peran keuangan syariah sebagai alternatif dan komplementer dengan perbankan Islam.

Bank of England dan Bank of France yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan, serta Bank of Indonesia yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan.

Bank of Indonesia dan Bank of France yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan, serta Bank of Indonesia yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan.

Bank of Indonesia dan Bank of France yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan, serta Bank of Indonesia yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan.

Menurut Charles Rowson, Ketua Dewan Syariah Bank of England, Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat berkembang dalam keuangan syariah.

John Chen, Wakil Menteri Keuangan Indonesia, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan peran keuangan syariah sebagai alternatif dan komplementer dengan perbankan Islam.

Bank of Indonesia dan Bank of France yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan, serta Bank of Indonesia yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan.

Bank of Indonesia dan Bank of France yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan, serta Bank of Indonesia yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan.

Bank of Indonesia dan Bank of France yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan, serta Bank of Indonesia yang berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan.

Asalkan, pemerintahan berikutnya dengan kandidat-kandidat wakil presiden berasal dari pendukung dan praktisi keuangan syariah benar-benar bisa menjadikan ekonomi dan keuangan syariah seperti garam dalam makanan. Yakni, menjadi terasa dan sangat diperlukan untuk melezatkan makanan, bukan seperti gincu dalam makanan, yaitu sekadar menjadikannya mencolok tanpa rasa.

Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia lebih baik menggunakan ilmu garam, bukan ilmu gincu yang sarat segala macam labelisasi Islam dari fundamental hingga nusantara, karena syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah rahmatan lil 'alamin, berdaya guna bagi semesta bukan hanya nusantara.

Qigong

<https://www.youtube.com/watch?v=tXVIhwhfDqe4>

<https://www.youtube.com/watch?v=RV2iYd1es0o>

<https://www.youtube.com/watch?v=2BhEkhSJkr8>

<https://www.youtube.com/watch?v=xSa2yFTaTLU>

[Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia](#)

<https://dsnmu.or.id/category/fatwa/>

[Pembelajaran Sharia Micro Finance Banking Untuk Maroko](#)



Kali kedua penulis ke Maroko adalah untuk tujuan yang sangat spesifik, yaitu pembelajaran sharia micro finance banking untuk kerajaan Maroko sekaligus mencari kesempatan lebih mendalami bahasa arab untuk perbaikan kemampuan komunikasi penulis dalam forum-forum

internasional dan untuk menyelesaikan buku ringkas ke-4 penulis dalam 3 bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Arab. Walaupun upaya Maroko untuk memiliki keuangan & perbankan Islam mandiri yang selalu dijegal oleh kepentingan Eropa khususnya Perancis di tiga tonggak kegagalan historis tahun 1985, 1995 dan terakhir di 2007; sampai di pertengahan 2013 ini, Party of Justice & Development (PJD) yang Islami dan Modern dan menguasai 105 dari 300 kursi parlemen, baru berhasil membuat majelis rendah parlemen Maroko meloloskan & menandatangani draft Undang-Undang yang akan membakukan keuangan & perbankan Islam. Draft Undang-Undang ini belum disetujui majelis tinggi parlemen untuk ditandatangani dan disahkan Raja Muhammad VI.



Dalam pertemuan-pertemuan persahabatan dengan Dr. Abdeslam

Ballaji salah seorang think tank utama parlemen dari PJD bersama dengan beberapa high profile government officials kerajaan Maroko, penulis menyampaikan presentasi tentang Pembelajaran Sharia Micro Finance Banking Untuk Maroko case study Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bank BRI Syariah). Begitu juga dalam diskusi individual dengan Presiden Asosiasi Persahabatan Indonesia Maroko Prof. Dr. Mariam Ait Ahmed. Mereka memahami bahwa yang diperlukan oleh rakyat Maroko



adalah Micro Finance Banking semisal Bank BRI Syariah ini dan bank syariah lainnya di Indonesia dengan fokus kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Namun Euforia keuangan syariah baru saja dimulai. Alih-alih sharia micro finance banking segera diimplementasikan untuk mengantisipasi resahnya masyarakat menengah ke bawah Maroko yang memerlukan pendanaan atas upaya-upaya kemandirian ekonominya, kerajaan Maroko malah sangat akomodatif terhadap group bank syariah besar dari Saudi semisal Faysal Islamic Bank dan beberapa group bank syariah besar Malaysia yang dikomandoi Bank Negara Malaysia.



Buku dalam bentuk softcopy karangan Catherine Graciet & Eric Laurent yang mengupas hal-hal kontroversial keluarga kerajaan Maroko membuat banyak masyarakat Maroko resah dan skeptis terhadap pemerintahan kerajaan. Undang-undang yang membakukan keuangan & perbankan

Islam sangat diharapkan masyarakat menengah ke bawah agar lebih berpihak kepada mereka melalui penerapan Sharia Micro Finance Banking. Bisa diprediksi bahwa apabila yang lebih diakomodir pemerintah kerajaan Maroko adalah group bank syariah besar berskala internasional yang sangat didominasi

semangat kapitalisme, maka tidak ada penawar yang berarti atas kontroversi rahasia umum keluarga kerajaan Maroko atas kekecewaan sebagian masyarakat Maroko yang sebagian besarnya adalah kelas menengah ke bawah.

Dalam banyak forum, persaudaraan dan persahabatan Indonesia dengan Maroko selalu diawali dengan cerita salah seorang wali songo Indonesia, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sepertinya seorang ulama biasa saja di Maroko karena banyak rakyat Maroko tidak mengetahui tentang beliau walaupun beliau termasuk yang mengawali tersebarnya persaudaraan Islam secara baik di masyarakat



Nusantara. Tidak berlebihan juga kiranya kalau sharia micro finance banking Maroko digugah oleh seorang pelaku keuangan syariah yang biasa saja di Indonesia karena tidak banyak yang mengenalnya. Sebagai 2 negeri yang sangat terhubung secara historis dalam silaturrahim ukhuwah Islamiyah, tidak berlebihan kiranya jika Indonesia dapat memfasilitasi Maroko memasuki sharia micro finance banking yang sangat diperlukan masyarakatnya, bahkan rajanya untuk mencegah terjadinya gejolak sosial yang dapat saja menjatuhkan pemerintahan sebagaimana yang terjadi di negara tetangga dekat Maroko. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, walaupun belum ada respon apapun dari pemerintah Indonesia diwakili Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atas keperluan Maroko mengembangkan sharia micro finance bankingnya; DR. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. (yaitu senior sekaligus guru langsung dan mitra kerja yang penulis kenal sejak tahun 1985 di Yordania) insyaAllah berbicara di forum internasional Maroko tentang sharia micro finance banking bulan Juni 2013.



تاريخ	الوقت	المكان
2014	26 / 04/2014	الرباط
2014	27 / 04/2014	الرباط
2014	28 / 04/2014	الرباط
2014	29 / 04/2014	الرباط
2014	30 / 04/2014	الرباط
2014	01 / 05/2014	الرباط
2014	02 / 05/2014	الرباط
2014	03 / 05/2014	الرباط
2014	04 / 05/2014	الرباط
2014	05 / 05/2014	الرباط
2014	06 / 05/2014	الرباط
2014	07 / 05/2014	الرباط
2014	08 / 05/2014	الرباط
2014	09 / 05/2014	الرباط
2014	10 / 05/2014	الرباط
2014	11 / 05/2014	الرباط
2014	12 / 05/2014	الرباط
2014	13 / 05/2014	الرباط
2014	14 / 05/2014	الرباط
2014	15 / 05/2014	الرباط
2014	16 / 05/2014	الرباط
2014	17 / 05/2014	الرباط
2014	18 / 05/2014	الرباط
2014	19 / 05/2014	الرباط
2014	20 / 05/2014	الرباط
2014	21 / 05/2014	الرباط
2014	22 / 05/2014	الرباط
2014	23 / 05/2014	الرباط
2014	24 / 05/2014	الرباط
2014	25 / 05/2014	الرباط
2014	26 / 05/2014	الرباط
2014	27 / 05/2014	الرباط
2014	28 / 05/2014	الرباط
2014	29 / 05/2014	الرباط
2014	30 / 05/2014	الرباط
2014	31 / 05/2014	الرباط

Di Maroko memang banyak yang “cantik”, “indah” dan “eksotis” untuk dijadikan target Diplomasi Ekonomi Syariah karena posisi negaranya yang menjadi target pariwisata dan bisnis negara-negara Eropa dan Timur Tengah bahkan Amerika dan Rusia. Amerika memindahkan sebagian

fasilitas silicon valley-nya ke area gurun sahara Maroko. Swasta Rusia diam-diam menjadi pemilik dan operator wisata gurun sahara bukan hanya di Maroko. Produk-produk buatan Maroko sangat mudah diterima oleh Eropa dan Timur Tengah. Bayangkan jika Indonesia berkolaborasi sebagai produsen barang-barang dengan kualitas baik dengan Maroko untuk lebih mudah masuk ke pasar Eropa dan Timur Tengah. Indofood sudah berkolaborasi dengan Maroko memasarkan Indomie ke Afrika Utara bahkan Eropa.



Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia tak serta merta menjadikan Indonesia memiliki peran besar dalam ekonomi syariah. Padahal banyak pihak, terutama dari negara-negara Islam di Timur Tengah & umat lainnya seperti negara-negara pecahan uni soviet serta tentu saja Maroko, berharap Indonesia dapat menjadi penengah dengan kemoderatannya dalam membagi kemampuannya untuk menanggapi berbagai rencana penerapan ekonomi syariah yang ada saat ini dengan kemampuan penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang ditandai dengan koordinasi baik penerapan fatwa keuangan syariah antara Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Keuangan Indonesia.





Sangat ironis jika melihat sikap negara-negara tetangga Indonesia yang berambisi menjadi hub keuangan syariah di Asia dan dunia. Singapura dalam diplomasi ekonomi syariahnya, pernah menyebutkan bahwa salah satu potensi mereka menjadi hub syariah adalah karena

bertetangga dekat dengan Indonesia. Saya jadi membayangkan, jika diberi amanah menjadi salah satu pemimpin negara ini, yang tentunya umat Islamnya akan mendukung penuh di semua lini untuk diplomasi ekonomi syariah, maka saya akan mengatakan "Kami siap segala sesuatunya untuk menjadi pemberdaya keuangan & perbankan syariah saudara-saudara kami dari Asia, Timur Tengah atau belahan dunia manapun termasuk Maroko di Afrika Utara paling Barat ... Dan kami adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia yang kaya dengan berbagai kemampuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah..."



Brazil: Catatan Pembelajaran Diplomasi Ekonomi



Brazil adalah negara terjauh menurut jarak dan waktu tempuh yang pernah penulis kunjungi. Walaupun Brazil penduduknya dianggap berbasis agama Katolik, namun orang Brazil sendiri lebih menganggap sepak bola sebagai agama mereka. Penduduk Brazil adalah orang-orang yang work

hard but play and party a lot. Menariknya Brazil adalah tipe negaranya yang dalam banyak hal menyerupai Indonesia. Kisaran jumlah penduduknya yang sekitar 200 jutaan dengan berbagai macam etnis dan ras, kelas ekonomi masyarakatnya yang menumpuk di kelas menengah dan menengah ke bawah serta ekonominya dengan titik berat sektor pertanian komoditas dan industri manufaktur, banyak menyerupai Indonesia.

Perbedaan yang menyolok saat tulisan ini dibuat adalah Brazil mempunyai Gross Domestic Product (GDP) tidak kurang dari US\$ 2.500 Milyar (2,5 Trilyun) yaitu lebih dari 3X GDP Indonesia yang diperkirakan US\$ 700 Milyar (0,7 Trilyun), yang berarti produktivitas serta pendapatan perkapita masyarakat Brazil lebih dari 3X masyarakat Indonesia. Padahal Brazil di periode tahun 1990an pernah dimasukkan ke dalam kategori less developed country untuk mendapatkan potongan hutang luar negeri sampai 80% dari yang berjalan, dan sejak 1985 sampai dengan 1995 telah berganti mata uang dari Cruzeiro sebanyak 6X dan akhirnya menetapkan Reales (R\$) sebagai mata uangnya. Periode 1985 – 1995 adalah masa yang berat bagi masyarakat Brazil, yaitu periode ekonomi dengan very high interest rate & very high volatility of purchasing power parity. Sebuah keadaan krisis yang jauh lebih panjang dan berat dibanding krisis ekonomi dan moneter yang



melanda Indonesia menjelang dan sampai di awal tahun 2000an.



Keberhasilan Brazil menjadikan negaranya menjadi salah satu negara dari most emerging countries bersama Rusia, Indonesia dan China (BRIC) pantas diambil sebagai pelajaran bagi Indonesia. Menurut Bank Central Brazil, yang memiliki kompleks perkantoran sangat

sederhana dibanding Bank Indonesia, 3 fitur kebijakan makro ekonomi yang membuat Brazil keluar dari krisis yang sangat panjang dan bertahan menghadapi krisis dunia, Eropa dan Amerika hingga sekarang adalah: Inflation Targeting, Fiscal Responsibility & Exchange Rate Flexibility. Kombinasi dari ketiga fitur kebijakan makro ekonomi ini mempunyai esensi kemandirian yang sejalan dengan kesyariahan dalam ekonomi. Kemandirian adalah salah satu yang yang diperumpamakan dalam bagian terakhir Hadits periwayatan dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah).

Brazilian Development Bank (BNDES) yang memiliki misi sosial

dan lingkungan khas Brazil, mempunyai kebijakan yang sangat berpihak kepada sektor usaha kecil produktif yang mendukung sektor ekonomi riil Brazil. Semakin kecil usaha produktif sektor riil, semakin kecil bunga yang dikenakan dan semakin lama jangka waktu yang dikenakan. Hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan praktik perbankan konvensional maupun syariah di Indonesia yang cenderung mengenakan bunga maupun margin yang tinggi bagi usaha kecil produktif sektor riil karena dianggap tidak atau kurang bankable dan berisiko tinggi.



Dalam interaksi penulis dengan beberapa Economists dari Santander Bank (ranking 5 total asset di industri keuangan Brazil) ada jurus ekonomi yang mereka pandang sangat dijunjung oleh pimpinan Brazil yang sudah diganti beberapa kali namun tetap diterapkan bahkan oleh Presiden Lula yang menjadi kebanggaan para pelaku ekonomi. Penerapan Exchange Rate Flexibility terhadap mata uang Dollar Amerika dan mata uang Euro Eropa, apabila tidak berhati-hati dan didukung oleh sektor riil yang kuat, akan mengganggu ekonomi Brazil. Untuk itu Presiden Lula tetap dengan segala kesederhanaannya (kediaman dan tempat kerjanya di Brasilia yang sederhana untuk ukuran pimpinan tertinggi negara, bahkan dibanding Indonesia sekalipun) menerapkan kebijakan yang sudah dijalankan oleh para pendahulunya, yaitu: mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan ekonomi dan keuangan yang terkait dengan mata uang Dollar Amerika dan mata uang Euro Eropa dengan mendorong ekspor Brazil yang terdiri dari produk-produk komoditas pertanian dan industri manufaktur ke negara-negara yang lebih beragam, terutama ke negara Latin Amerika lainnya seperti Argentina, Uruguay, Paraguay, Mexico dan lainnya, serta negara-negara lainnya seperti negara-negara Asia dan Afrika.



Komoditas pertanian Brazil seperti Kopi dan Pisang sangat mendunia. Begitu juga produk industri manufaktur mobil yang terkenal dengan flexy cars ukuran kecil dan sedang dengan mesin terintegrasi 3 in 1 menggunakan bahan bakar petroleum, ethanol dan gas,

sementara mobil-mobil besar di Brazil menggunakan bio diesel dari banyak macam-macam tumbuhan di Brazil. Lagi-lagi ini sangat sejalan dengan kemandirian ekonomi sebagai salah satu yang yang diperumpamakan dalam bagian terakhir Hadits periwayatan dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (H.R. Ibnu Majah). Kebijakan sektor riil dalam ekonomi dan keuangan Brazil adalah melakukan privatisasi nasional atas semua Multi National Companies dengan memberi tax heaven sampai dengan 20 tahun. Mobil-mobil Eropa seperti VW dan mesin-mesin pabrik yang diproduksi di Brazil, jauh lebih sesuai dan canggih untuk kondisi alam Brazil dan Latin Amerika dibanding negara-negara asal mobil dan mesin tersebut.

Infrastruktur ekonomi dan perkotaan juga sangat diperhatikan oleh pemerintah Brazil secara berkesinambungan. Pemindahan ibukota dari Rio De Janeiro ke Brasilia yang dimulai masa pemerintahan Presiden Kubichek (1960an) sahabat Presiden Soekarno adalah visi struktur ekonomi dan perkotaan yang brilliant. Sao Paolo yang merupakan ranking kota yang lebih padat dibanding Jakarta memperlihatkan antrian lalu lintas yang lebih sedikit, jumlah



motor yang lebih sedikit walaupun kepadatan penduduknya 3X dibanding Jakarta.

Kebijakan ekonomi dan keuangan Brazil yang mengandalkan kemandirian sangat tercermin dalam pengaturan lembaga keuangan di Brazil. Bank-bank Umum di Brazil diarahkan untuk merger sehingga Lembaga Keuangan rangking 1 – 5 adalah bank-bank lokal standar internasional dengan jaringan yang “besar” dan “indah” interaksinya dengan komunitas masyarakat Brazil. Bradesco sebagai lembaga keuangan rangking 3 di Brazil adalah contoh konkret indahnya interaksi Lembaga Keuangan yang mempunyai Head Quarter Office menyatu dengan masyarakat 1 distrik di kota Sao Paulo. Dengan yayasannya, Bradesco memberi beasiswa dan kesempatan kepada komunitas masyarakat yang bersedia bekerja paruh waktu atau bekerja penuh, dengan jenjang karir yang menarik. Turn over pegawai di Bradesco bisa serendah 4% saja setahun, itupun biasanya dari pegawai professional hire yang bukan berasal dari akar komunitas Bradesco. Jumlah Lembaga Keuangan di Brazil jauh lebih sedikit dibanding Indonesia dan diproteksi dengan kebijakan pemerintah yang tidak mudah memberikan izin kepada Lembaga Keuangan asing untuk beroperasi di Brazil. Lembaga Keuangan asing yang memberikan produk-produk keuangan generic seperti Lembaga Keuangan lokal akan sulit memperoleh ijin operasi di Brazil. Pemerintah Brazil juga tidak berkeinginan menciptakan Otoritas Jasa Keuangan. Brazil lebih menerapkan kesederhanaan kebijakan pengawasan yang berkesinambungan antara Bank Sentral, Kementrian Keuangan dan Kementrian Perdagangan dalam sebuah kebijakan pengawasan pengembangan perekonomian menyeluruh yang menjadi agenda utama kepemimpinan tertinggi Brazil.

Ada satu hal utama yang belum mampu dilakukan Brazil terkait dengan penyediaan instrumen permodalan untuk menarik investor dari luar Amerika dan Eropa masuk ke Brazil. Kebijakan perbankan yang hanya menjamin kisaran setara dengan US\$ 35.000 untuk foreign deposit perindividu sangat tidak menarik untuk orang asing. Bursa Brazil yang menggabungkan securities,

commodities & futures exchange belum menarik minat investor dari luar Amerika dan Eropa untuk masuk. Tahun 2011 BM&FBOVESPA Brazil sebagai securities, commodities & futures exchange melakukan road show ke negara-negara timur tengah untuk mengajak masuk sebagai investor di Brazil sebagai most emerging country. Mereka gagal mengantisipasi anggapan investor negara-negara timur tengah yang menganggap Brazil bukanlah negara yang bisa mengakomodir keinginan para investor untuk melakukan investasi di sharia compliant investment. Brazil memerlukan investor dari luar Amerika dan Eropa untuk kebijakan antisipasi krisis yang dapat melanda kawasan Amerika dan Eropa.

Secara pribadi, penulis menawarkan kemampuan expertise khas Indonesia dalam memfasilitasi keperluan penciptaan sharia compliant investment di Brazil kepada International Business BM&FBOVESPA Brazil. Tentu saja hal ini penulis sampaikan dan usulkan kepada Duta Besar Indonesia di Brazil Bapak Sudaryomo Hartosudarmo yang bersama Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Republik Indonesia serta Consul Paulo Camiz De Fonseca sangat akomodatif menemani kunjungan benchmarking penulis ke Brazil di tiga kota utama yaitu Rio De Janeiro, Brasilia dan Sao Paulo. Tidak berlebihan kiranya jika Indonesia dapat memfasilitasi Brazil memasuki pasar modal dan keuangan syariah dengan memberikan training & advisory melalui hubungan formal government to government yang akan menjadi indikator utama keberhasilan Diplomasi Ekonomi Indonesia di mata dunia. Brazil memang "besar" dan "indah" untuk dijadikan target Diplomasi Ekonomi.

Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia tak serta merta menjadikan Indonesia memiliki peran besar dalam ekonomi syariah. Padahal banyak pihak, terutama dari negara-negara Islam di Timur Tengah dan umat lainnya seperti negara-negara pecahan uni soviet, berharap Indonesia dapat menjadi penengah dengan kemoderatannya dalam membagi kemampuannya untuk menanggapi berbagai rencana penerapan ekonomi syariah yang ada

saat ini dengan kemampuan penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang ditandai dengan koordinasi baik penerapan fatwa keuangan syariah antara Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan 2 otoritas keuangan yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Sangat ironis jika melihat sikap negara-negara tetangga Indonesia yang berambisi menjadi hub keuangan syariah di Asia dan dunia. Singapura dalam diplomasi ekonomi syariahnya, pernah menyebutkan bahwa salah satu potensi mereka menjadi hub syariah adalah karena bertetangga dekat dengan Indonesia. Saya jadi membayangkan, jika diberi amanah menjadi salah satu pemimpin negara ini, yang tentunya umat Islamnya akan mendukung penuh di semua lini untuk diplomasi ekonomi syariah, maka saya akan mengatakan “Kami siap segala sesuatunya untuk menjadi hub dan tujuan investasi syariah saudara-saudara kami dari Timur Tengah atau belahan dunia manapun termasuk Brazil ... Dan kami adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia yang kaya dengan berbagai kemampuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah...”